



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok. AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201
Faksimile 024-7612334 Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 04 November 2022
Kepada
Yth. Terlampir
Nomor : 0/606
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1
Hal : Undangan KP II Revisi
RTRWPJateng

di-
TEMPAT

Dalam rangka Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, akan diselenggarakan Konsultasi Publik II, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 November 2022
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Sala View Hotel,
Jl. Slamet Riyadi No.450 RT 02/RW 13, Purwosari,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
Acara : Konsultasi Publik II Penyusunan Revisi RTRW
Provinsi Jawa Tengah
Catatan : Link Materi : <https://bit.ly/20221110KP11>

Sehubungan hal tersebut, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak/Ibu untuk hadir atau menugaskan staf yang berkompeten pada acara tersebut. Demikian atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAANRUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:
1. Sekretaris



Lampiran I Surat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dan Penataan Ruang
Tanggal : 04 November 2022
Nomor : 0/606

Kepada Yth.:

Tim Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

1. Ir. Achmad Gunawan, MT / Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Eko Sukoco, SSTP. SH / Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitas Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Agus Nugroho Adi Prasetyo, SH. MH. / Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;
4. Basyier Gemaning Insan, ST., M.PWK. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Emy Dwi Purwantiningih, Amd / Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Ir. Sri Sulistyorini DM / Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Tavana Dewi Handayani, S.T. / Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Muhamad Chomsul, SST., M.Eng / Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bagus Adi Raharjo, S.SIT M.Sc / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Novita Luh Widiyastuti, SP., M.Si. / Kepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Irma Damayanti, S. Hut., MM. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Bidang Penataan Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kartika Atyasari, S. Hut., M.URP / Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Agus Sugiharto, ST., MT. / Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
14. Agus Pujiyanto, ST. / Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
15. Ir. Lilik Harnadi, M.Si., M.Sc. / Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
16. Purwanto, SH., M.Par. / Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
17. Suyanta, S.Pd., M.Pd / Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
18. Arif Sugeng Haryanto, ST. / Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
19. Dian Istiana Saputri, ST / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
20. Muhamad Haidar Romzi, ST. / Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Subbag Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

Tengah;

21. Siti Aisyah, S.P., Mpp, M.T. / Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa tengah;
22. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
23. Subkoor Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
24. Subkoor Pemanfaatan Ruang;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara;
26. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang;
28. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora;
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali;
30. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes;
31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
32. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan;
34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
35. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;
36. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen;
37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
38. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
39. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus;
40. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
42. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
44. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
45. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
46. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
47. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
48. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen;
49. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
50. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal;
51. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
52. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri;
53. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
54. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang;
55. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan;
56. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;
57. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
58. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;
59. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal.

Perguruan Tinggi

60. Ketua Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro;
61. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Surakarta;
62. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung;

63. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Semarang;
64. Ketua Prodi Lingkungan dan Perkotaan Universitas Khatolik Soegijapranata;
65. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
66. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Selamat Sri;

Organisasi Profesi

67. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Tengah

Forum Penataan Ruang

68. Prof. Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc. (Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dari unsur Akademisi)
69. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA (Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dari unsur Profesi)
70. Prof. Dr. Ir. Nany Yuliasuti, MSP (Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dari unsur Tokoh Masyarakat)

Sektor Swasta

71. Direksi PT. Tirta Utama Jawa Tengah

Lembaga Swadaya Masyarakat

72. Direktur Mercy Corps Indonesia.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok. AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201
Faksimile 024-7612334 Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Nomor : 0/604
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1
Hal : Undangan KP II Revisi
RTRWPJateng

Semarang, 04 November 2022

Kepada

Yth. Terlampir

di-
TEMPAT

Dalam rangka Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, akan diselenggarakan Konsultasi Publik II, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 November 2022
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Zoom Meeting ID : 843 1532 2118
Password : RTRWP
Acara : Konsultasi Publik II Penyusunan Revisi RTRW
Provinsi Jawa Tengah
Catatan : Link Materi : <https://bit.ly/20221110KP11>

Sehubungan hal tersebut, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak/Ibu untuk hadir atau menugaskan staf yang berkompeten pada acara tersebut.

Demikian atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:
1. Sekretaris



Lampiran I Surat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dan Penataan Ruang
Tanggal : 04 November 2022
Nomor : 0/604

Kepada Yth.:

Pemerintah Pusat

1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah X Jateng-DIY;
8. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta;
9. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa;
11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana;
12. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak;
13. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung;
15. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Jawa-Madura;
17. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Cimanuk Citanduy;
19. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun;
20. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo;
21. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo;
22. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu;
24. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi;
25. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

26. Balai PSDA Serang Lusi Juana;
27. Balai PSDA Bodri Kuto;
28. Balai PSDA Bengawan Solo;
29. Balai PSDA Serayu Citanduy;
30. Balai PSDA Pemali Comal;
31. Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo;

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

32. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Banyumas;

34. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten *Batang*;
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
36. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali;
37. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes;
38. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap;
39. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak;
40. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
41. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara;
42. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
43. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
44. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kendal;
45. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten;
46. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus;
47. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang
48. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
49. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan;
50. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
51. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
52. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo;
53. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
54. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang;
55. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sragen;
56. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
57. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
58. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
59. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri;
60. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
61. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
62. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
63. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga;
64. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang;
65. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
66. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;

Perguruan Tinggi

67. Ketua Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Universitas Diponegoro;
68. Ketua Prodi Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro;
69. Ketua Prodi Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro;
70. Ketua Prodi Lingkungan dan Perkotaan Universitas Khatolik Soegijapranata;

71. Ketua Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang;
72. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang;

Sektor Swasta

73. Direktur PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
74. Direktur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah;
75. Direktur PT. Jateng Petro Energi;
76. Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang;
77. Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia DAOP 5 Purwokerto;
78. Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta;
79. Direktur Badan Otorita Borobudur;
80. Direktur PT Djarum Foundation;
81. Direktur Kawasan Industri Terpadu Batang;
82. Direktur PT Kawasan Industri Kendal;
83. Direktur PT Jateng Land;
84. Direktur PT Tirta Investama (AQUA);
85. Direktur PT Perusahaan Listrik Negara;

Organisasi Profesi

86. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah;

Lembaga Swadaya Masyarakat

87. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah;
88. Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI);
89. Greenpeace Indonesia;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang Barat, Kota Semarang 50144 Telp. 024-7608201
Website: <https://pusdataru.jatengprov.go.id> Email: dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA
NOMOR: 650/7840/2022

KONSULTASI PUBLIK (KP) 2
PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-11-2022) bertempat di Hotel Sala View Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah melaksanakan Konsultasi Publik 2 dalam rangka Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

Konsultasi Publik 2 diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terkait. Adapun beberapa kesepakatan penting yang dihasilkan dari Konsultasi Publik 2 Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RTRWP Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yaitu adanya integrasi antara matra darat (RTRW) dan matra laut (RZWP3K). Selain itu perlu adanya penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Nasional khususnya pada garis pantai dan dengan nomenklatur peraturan perundangan terkait.
2. Kesepakatan penentuan garis pantai antara provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur penting dan harus diperhatikan serta jangan ada perbedaan yang dikemudian hari yang menimbulkan masalah
3. Perlu Integrasi *coastal cell & watershed cell*: mengamankan alur migrasi penyu & ikan sidat katadromik (diadromik) perlu didukung pengamanan Sempadan Pantai (*Sand-dune*) & Sempadan Sungai dan Badan Air Lainnya (Rawa Pantai, Laguna, Danau, Irigasi, waduk) serta pengaturan pemanfaatannya dan dibebaskan dari bangunan apapun untuk perisai pantai
4. Pengembangan wilayah Jawa Tengah harus memperhatikan konstelasi di Pulau Jawa dan konstelasi nasional.
5. Koridor Pantura Jawa Tengah menjadi super koridor ekonomi dalam konteks kebijakan nasional, dan hal ini penting untuk menjadi landasan dalam pengembangan wilayah Jawa Tengah kedepan.
6. Provinsi Jawa Tengah harus mampu meminimize biaya logistik untuk meningkatkan daya saing produk unggulan melalui penataan ruang. Serta harus memikirkan alternatif lain terkait perencanaan kedepannya. (Implementasi hub and spoke dalam membuat struktur dan pola ruang Provinsi Jawa Tengah dan harus ditetapkan).
7. Perlu pertimbangan kebutuhan sarana dan prasarana khususnya untuk mendukung kebutuhan air baku dan tanah urug di akhir tahun rencana guna mendukung alokasi ruang Kawasan Peruntukkan Industri di koridor pantura.
8. Terdapat peraturan mengenai kawasan pergaraman yaitu Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional namun belum diakomodir di dasar hukum dalam raperda RTRW
9. Sektor pertanian wajib diakomodir dalam dokumen raperda karena Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang terdiri dari banyak desa-desa yang sangat mengandalkan sektor pertanian.
10. Dalam Revisi rencana tata ruang harus mempertimbangkan upaya pencapaian target pembangunan Jawa Tengah naik 7% sesuai amanat Perpres 79 Tahun 2019 dan tata ruang harus bisa memainkan peran antara kepentingan nasional yang harus di eksekusi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi tetap harus berimprovisasi untuk pencapaian target, melalui pengaturan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat serta tidak diperbolehkan.
11. Luasan lahan pertanian diupayakan tetap untuk kepentingan ketahanan pangan serta keberadaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berada di luasan lahan pertanian. Selain itu nantinya pengendalian lahan pertanian akan diatur dalam pengaturan zonasi.
12. Perbaiki BAB 4 raperda sesuai masukan hasil Konsultasi Publik 2 dan hasil kajian materi teknis. (Delapan kawasan strategis provinsi memiliki arahan pembangunan masing-masing dan potensi akselerasi dan elaborasi antar Wilayah Pengembangan)
13. Point-point penting lainnya yang tertuang dalam Notulensi Konsultasi Publik ke-2 hari ini, terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Surakarta, 10 November 2022

Forum Penataan Ruang Provinsi (FPR) Provinsi Jawa Tengah

Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
Setda Provinsi Jawa Tengah

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Setda Provinsi Jawa Tengah

NIP.

BAPPEDA
Provinsi Jawa Tengah

BASYER G. USAN
NIP. 19850823 2003 1003

Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Penataan Ruang

Dian Purbandari
NIP. 19670516 19903 2003

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah

LILIK HARNADI
NIP. 19650211 199403 1004

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Penataan Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Irma Darmayanti
NIP. 19750513 200003 2004

M. I. TRIADIM
NIP. 19730212 200502 1002

Biro Hukum
Setda Provinsi Jawa Tengah

NIP.

Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Pengembangan & Pembinaan Teknis

AGUS PUJIANTO
NIP. 19790829 200903 1003

Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah

NIP.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan

Kartika Atyan
NIP. 19861224 201001 2019

Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah



W. H. W. H. - W

NIP. 19751101200032005

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah



M. R. B. A.
NIP. 197406192009031003

DPMPTSP
Provinsi Jawa Tengah



TAVIANA DH
NIP. 196503091990032006

Dinas PU BMCK
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan

NIP.

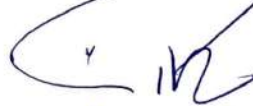
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Tengah

NIP.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

NIP.

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah



Firdaus Blyaka S.
NIP. 197210022006041003

Dinas
Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

NIP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NIP.

Dinas PU BMCK
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan
Bangunan Gedung

NIP.

Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah



BACUS ADI R.
NIP. 19830723200801003

FPR Provinsi Jawa Tengah
dari unsur Akademisi

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo
NIP.

FPR Provinsi Jawa Tengah
dari unsur Profesi

FPR Provinsi Jawa Tengah
dari unsur Tokoh Masyarakat

.....
NIP.

.....
NIP.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah



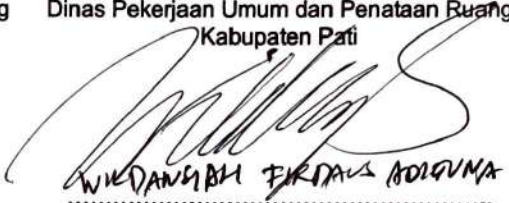
.....
DIAN APRILIYANA
NIP. 19800417 200604 2005

Pemerintah Kabupaten/Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pati

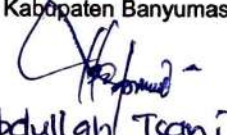
.....
NIP.




.....
WICANDANI FIRDAUS ADIGUNA
NIP. 1981227 20102 1003

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan



.....
M. Abdullah Tsani
NIP. 19810410 200903 1003



.....
Mochtar Effendi
NIP. 19870321 202203 1003

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Batang


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang

.....
NIP.


.....
NIP.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga



.....
Firmansyah, S.Si, MT
NIP. 19780802 201001 1008



.....
BARDI NURCAHYA, S.T
NIP. 19791221 200903 1009

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Boyolali

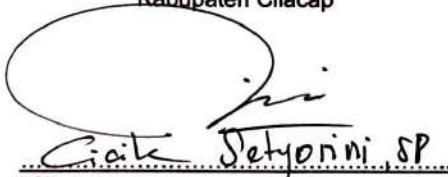


FITRIA NUR ROHMAH
NIP. 19870619 201902 2 006

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kudus

.....
NIP.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Cilacap




Citik Setyorini, SP
NIP. 19700507 199803 2 004

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Wonogiri

.....
NIP.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Grobogan



Mutiara Kusumadanti
NIP. 19940419 202012 2 030

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jepara


.....
NIP.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purworejo




DHIMAS SETYOADI N
NIP. 19970322 2019 1 000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten



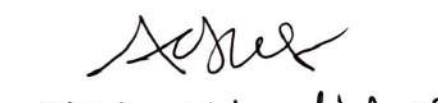
JOKO SUPRPTO
NIP. 19750602 199311 1 001

Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Semarang



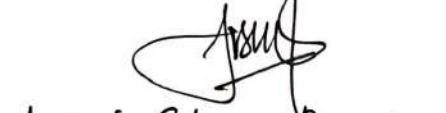
SRI UTAMI S., ST.-M.-SI.
NIP. 19700622 199703 2 007

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sragen



Albertus Wahyudi P., ST
NIP. 19780626 200604 1 014

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo

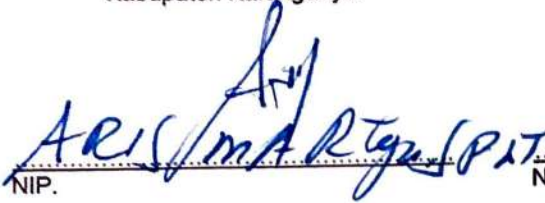


Isyad Cahyono Dewantero
NIP. 19980806 202012 1 005

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tegal

.....
NIP.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Kabupaten Karanganyar


NIP. _____

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak

NIP. _____

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



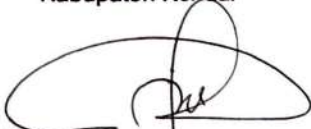
Novi Pristianti
NIP. 19511107 201502 2 002.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung



Deha Kanawan
NIP. 19740723 20101 1 013.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kendal



ERNA ISMIHANI
NIP. 19840509 201001 2 003

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo



RENI ANDRIANA
NIP. 19681005499803 2003

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Surakarta

NIP. _____

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang



RINA NUR APRILLIA
NIP. 198209172019022001

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang



ARNIS RIZKI
NIP. 1983 0210 200604 1 005.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pekalongan

NIP. _____

Dinas Penataan Ruang
Kota Semarang

NIP. _____

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Salatiga



Fery Setyo Nugroho
NIP. 19900319 201502 1 001

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tegal

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang
Kabupaten Brebes


Iman Senoadji F STMEg
NIP. 19761129 200312 1 006

NIP.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rembang

NIP.

<

NOTULEN

Hari/ Tanggal : Kamis, 10 November 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Cendana Lantai 8
Hotel Sala View, Jl. Slamet Riyadi No.450
Acara : KONSULTASI PUBLIK II, PENYUSUNAN REVISI RTRW PROVINSI
JAWA TENGAH

Bu Jamilah

Hampir semua kab/kota keberatan dengan pertanian, padahal pertanian adalah kunci ketahanan pangan. Dengan adanya tol mengubah konektivitas dan aksesibilitas antar kab/kota.

Kemiskinan masih cukup tinggi.

Sistem Pusat Permukiman, PKN 3, PKW, PKL 67

Mitigasi dan Adaptasi bencana sebagai solusi, ketahanan sebagai kerangka kerja untuk terintegrasi untuk pengembangan masyarakat, manajemen pesisir dan domain manajemen bencana. Adaptasi dengan nature based solution harus berkeadilan.

Sutrisno Anggoro MS – MSDP FPIK UNDIP

Integrasi RZWP3K ke dalam RTRW PROV JATENG

Pemda wajib menyusun semua perencanaan sesuai kewenangan masing-masing. Yang menyulitkan tata ruang, garis pantai selalu berubah, akibat abrasi, ekresi. Harus terintegrasi dengan sempadan sungai. Integrasi RZWP3K ke RTRW, keselarasan hulu ke Hilir keterpaduan coastal cell dan watershed cell. Sinergiharmoni dengan kebijakan integrasi antar matra, antar coastal cell, watershed cell, RZ dan RTRW, Blue Economy dan Green Economy.

Satu hal yang masih krusial di RTRW dan RZWP3K, ada alur migrasi biota dilindungi. Jika biota tidak dilindungi, bisa punah, jika terkena cemaran atau air panas. Bisa ditambahkan pada aturan yang terintegrasi. Terkait dengan UU Sungai juga. Coastal cell dan DAS (watershed cell) di Jateng masih belum terintegrasi. Jadi yang perlu diintegrasikan selain pola dan rencana ruang laut juga alur migrasi biota laut. Biota laut yg dilindungi diantaranya PENYU, IKAN SIDAT.

Kawasan Konservasi, minimal 20% dari total perairan. Memperhatikan keserasian antar matra untuk menghadapi bencana.

Okto Risdianto Manullang

Dampak Pembangunan Infrastruktur thd peningkatan perekonomian Jawa Tengah.

CJIBF 2022, Planner harus ada di tengah. Jawa Tengah sangat seksi untuk investasi karena salah satunya upahnya murah. Seharusnya Jateng adalah leading di ekonomi. RTRW ini harus mampu menangkap peluang, apa yang bisa kita tangkap dan kita curi. Kemampuan fiskal di Jateng sampai mana?. Investasi panglima pembangunan kata pak ganjar, mana korelasinya?. Catatan investasi sekitar 60 T di CJIBF, tren 3 tahun terakhir menurun.

Q & A

Kab banyumas, dinas perumahan dan kawasan permukiman

Membahas daya dukung daya tampung dan mitigasi, arahan2ny di kedungsepur ada pemb di kwsn industry, sekotro unggulannya bukan industry, ada beberapa jadi lebih harmonisasi alam, apakah ini tidak malah menarik mundur. Pertanian jmlhny besar krn lahannya besar, tmsk kemiskinan ekstrem, jika kita tidak diberikan kesempatan untuk membangun industri, bmgkn bisa

berkembang?, banyumas pny perkotaan yang berkembang juga, purwokerto sbg pusat dagang dan jasanya.

Prof Gik

Belum disinggung mengenai outputnya jawa tengah apa?. Sektor pertanian kok belum ada?, di tiap kab/kota harus ada sector pertanian. Harus hasil dari apa yang telah dijelaskan tadi. Mengusulkan antara matra laut dengan matra darat, region2ny yg akan bersinggungan dibuat dengan satu lembaga khusus. Lembaga tersebut bisa dimasukkan dari daerah dari pusat bgmn jateng berperan dalam tingkat nasional, potensi lautnya seharusnya besar. Bgmn bisa menyatu dengan sisi barat, harus ada sesuatu yg bisa di ekspor. Harus mempunyai sumbu sendiri, jgn kalah dengan jabar dan jatim. Agar ke utara bisa lebih kuat sbg center nasional. Penduduk paling besar ada di jateng.

JAWABAN

Prof sutrisno

Pengembangan tambak di karimun jawa merupakan dilemma, jika dilihat pengelolaan wilayah pesisir terpadu, tambak disana ditujukan untuk apa? Jika untuk produksi massal harus hati2. dalam hal pariwisata, apa saja jenis2 ikan, gmn pembiakannya, dll. Blue economy harus ditegakkan sustainable input hrs dijamin berkelanjutan, produksi harus bersih, zero waste. Bagaimana menyelamatkan hewan2 liar. Selain mendukung konservasi juga mendukung wisata. Di karimun jawa rencanya jga ada pengembangan spt di teluk awur. Sistem budidayanya gmn yg aman, dgn cara memberikan pakan yg aman, tidak memberikan pestisida.

Pak Okto

Industri seperti apa yang cocok di selatan seperti apa?, kita harus punya outlet jangan hanya sebagai tempat transit antara jabar dan jatim. Transportasinya diatur, bgmn bentuk pengaturannya?. Jateng harusny menjadi leading di pulau jawa, Indonesia dapat terdongkrak. Hub and Spoke konsepnya bisa diaplikasikan di jateng

ZOOM

Kawasan Industri Demak

Brebes sd rembang, tanahny perlu diurug, urugny drmn?, dr gunung atau laut?. Jika ada integrase dengan kelautan , udara jg bisa integrase juga, kaitanny dgn jaringan internet. Daya dukung air baku mjd permasalahan di kwsn industry demak. Daya dukung daya tampung dan sumberdaya perlu benar2 diperhatikan untuk indsutri2 eksisting yang sudah ada, bisa mjd masukan. Bgmn dgn ruang udaranya apakah ada rencana integrase juga?

Arief – WALHI Jateng

KP sudah dilakukan 2x, lembaga masyarakat sgt minim disertakan. Kemiskinan yang tinggi, termasuk daerah rawan bencana, yang disampaikan berbeda. Penyediaan lahan pertanian kurang, kwsn hutan lindung juga berkurang massif akan menambah bencana yang ada di jateng. Penyediaan tenaga listrik di jateng muncul PLTU baru di pemalang, pemalang msk dlm PLTDU. Di dlm RPUPL tidak ada penambahan PLTU baru, jika tetap ditetapkan maka akan melanggar hukum.

Hotma Uli Sidabalok – Unika

Persoalan ketahanan pangan akan menjadi resiko yang akan dihadapi di Jateng. Jika berubah fungsi akan menjadi masalah. Apabila lahan pertanian berubah apakah sudah dipikirkan oleh Jateng bgmn dampak ke masyarakat?, persoalan2 masyarakat menjadi titik brkt pertama. Bgmn kebebasan Jateng menetapkan RTRWP, hrs punya kebebasan untuk mengatur sendiri, permasalahan2 di Jateng jgn terabaikan oleh proyek2 strategis nasional.

Bappeda Kota Tegal

-

JAWABAN NARSUM

Mencari equilibriumnya, mana yang berpeluang itu yg didorong dan beri kepastian, termasuk industri di pantura Jateng. Apa treatmentny, brp investasinya. Evaluasi di semua investasi, brp benefit yg tercreate?. Untuk lahan pertanian dikunci untuk angka segitu (LP2B). LSD menunggu kesepakatan Kab/Kota dengan ATR.

Cilacap sgt unik, warganya minta pendampingan agar berasnya dapat dikemas di tmpt mereka sendiri dgn nama sendiri. Bahan tanah urug, kita sudah berusaha terkait dgn landsubsidence, untk mengurug dgn material yg ringan. Bisa dilihat pd Perpres 11 th 2022. Harmonisasi hulu dan hilir, kaitanya dgn mitigasi bencana dulu, selanjutnya baru lainnya.

Bu diah : sudah melakukan FGD Sektoral, jadi jika ada tambahan masukan bisa diberikan lsg kepada kami.

MAGELANG

Di Magelang mengalami paradox terkait pertanian, irigasi bocor, dll. Salah satu yg mjd kewenangan provinsi. Tolong di wilayah perencanaan mencari data pertanahan, untuk menetapkan kawasan lindung. UMK mnrt cipta kerja sudah sangat dimudahkan, tetepi PRnya di tata ruang di Magelang, UMK makin byk yg menyebar. Scr WP di secang membuat KPI, tapi mempertimbangkan catchment area di daerah tsb.

PWK UNDIP

Revisi RTRWP menjadi guideline Pemprov dan Pemkab Pemkot, cascadingny perlu dirunut kembali, misalny tujuannya meningkatkan potensi wisata dll. Kemudian di breakdown wisata apa saja, dll. Scr substansi isu perubahan iklim sudah dibahas, beda dgn bencana, perubahan iklim akan berkontribusi dalam cuaca ekstrem dll. Strateginya blm tepat, bgmn cara mengurangi cuaca ekstrem tsb dll. Peningkatan pendapatan masy, perlu didorong dan perlu intervensi dari pemerintah.

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan maupun Saran	Masukan dan Saran
11/10/2022 10:48:14	Arif Syamsu	Walhi Jawa Tengah	Terkait formil—> mohon pelibatan masyarakat diperluas dan diperbanyak. Utamanya masyarakat yg saat ini sedang berdampingan dg kegiatan pembangunan. Secara materil —> di Jawa Tengah ada KLHS Jateng dan KLHS Pegunungan Kendeng. Keduanya menjadi penting untuk menentukan pertumbuhan di Jateng mengingat krisis iklim dan ancaman krisis pangan di Jateng. Jangan sampai ada pembangunan namun mengesampingkan kajian ilmiah yg sudah ada. Terkait dg kondisi krisis pangan maka seharusnya RTRW berbicara perluasan kawasan pertanian untuk persediaan pangan. Bukan malah semakin mengurangi untuk perluasan kawasan2 pembangunan	
11/10/2022 10:54:01	Yenata Novitasari	BPKHTL Wil. XI Yogyakarta	data kawasan hutan sebaiknya disinkronkan dengan data RKTP Prov. Jawa Tengah. Jika data RKTP belum update, maka dapat menggunakan data terbaru, yang saat ini menggunakan data perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Jawa Tengah (SK MenLHK No. 6605/2021). terima kasih.	
11/10/2022 10:56:19	Wijanto Hadipuro	Unika Soegijapranata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat adat seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Jamilah dari tim penyusun belum terakomodir dalam RTRW. Sebaiknya masyarakat adat seperti Sedulur Sikep dan kearifan/pengetahuan lokal perlu dicantumkan dalam Ketentuan Umum No. 11 berikut pasal atau ayat turunannya. 2. Tata kelola air dan rooms for water atau pemberian ruang untuk air seperti 'sempadan' pantai dan sempadan sungai perlu dievaluasi per area secara spesifik. Rujukan terkait dengan rooms for water dapat dilihat dalam kasus banjir di Belanda dan konsep pencegahan banjir baik banjir karena hujan maupun karena air pasang laut. Terkait hal ini perlu dicantumkan dalam Ketentuan Umum No. 26 dan Pasal atau ayat turunannya, seperti pada Pasal 37 dan Pasal 54. 3. Kawasan eko region perlu ditegaskan dalam Ketentuan Umum No. 40 dan perlu dijabarkan ke dalam pasal dan ayat terkait. 4. Pasal 24 dan Pasal 33 perlu menyebut secara spesifik lokasinya. 5. Perlu dicambahkan Pasal terkait dengan sanksi baik pidana maupun perdata bagi pembuat kebijakan yang melanggar tata kelola, seperti yang ada pada Pasal 111 UU No. 32 tahun 2009. 	
11/10/2022 11:11:15	Zainul Munshori	Bappeda Kab.Blora	<p>a. Mengusulkan kawasan perkotaan Randublatung menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang akan ditopang oleh Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Jati yang diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Wilayah Blora Selatan; Hal ini sangat terkait dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019, dimana di Kawasan Blora Selatan akan dibangun Bendung Gerak Karangnongko (Kecamatan Kradenan/Kab. Bojonegoro), Peningkatan Jalan Randublatung-Getas-Batas Kabupaten Ngawi (akan membuka akses Blora Selatan dan KHDTK UGM: 11 ribu hektar).</p> <p>b. Mengusulkan ruas jalan Randublatung-Getas-Batas Kabupaten Ngawi menjadi Jalan Provinsi (Perpres 79 Tahun 2019);</p> <p>c. Mempertimbangkan adanya pembangunan Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah, rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Perpres 79 Tahun 2019) di Kecamatan Kradenan dan rencana pembangunan Bendungan Cabean di Kecamatan Todanan; .</p> <p>d. Menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan kondisi terkini dan mempertimbangkan Perda 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.</p>	

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan maupun Saran	Masukan dan Saran
11/10/2022 11:21:09	Sudarno	Bapelitbang Kabupaten Batang	<p>1. Pada Mengingat perlu dimasukkan Perpres 109/2020</p> <p>2. Pasal 7, pada WP Petanglon perlu ditambahkan sektor industri.</p> <p>3. Pasal 11(2), jalan raya Batang (Pekalongan) dicermati kembali.</p> <p>4. Pasal 11(7) ada rencana dryport yang terintegrasi dengan pelabuhan di KITB.</p> <p>5. Pasal 12 (3), jalur kereta api cepat melalui jalur selatan, kereta api semi cepat melalui jalur utara dengan optimalisasi double track yang ada sekarang. Jaringan kereta api antarperkotaan ada reaktivasi Semarang Tawang - Tanjung Emas.</p> <p>6. Pasal 13 (1) ada rencana pengembangan Stasiun Plabuhan untuk mendukung KITB.</p> <p>7. Pasal 15(2) ada rencana pembangunan pelabuhan laut untuk KITB.</p> <p>8. Pasal 25 huruf a. Perlu ditambahkan Bendung Urang dan Bendungan Kedunglanggar untuk suply air baku KITB. Huruf b. Untuk embung dicermati kembali hasil studi potensi embung yang kajiannya dilaksanakan oleh Pusdataru tahun 2022.</p> <p>9. Pasal 26 (2) perlu ditambahkan SPAM Regional Petanglon sistem Kaliboyo.</p> <p>10. Kawasan strategis provinsi perlu ditambahkan pada ayat 3 huruf a yaitu Kawasan</p>	
11/10/2022 11:25:43	Rini Purwiastuti	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, KLHK	<p>semua kegiatan dimulai dengan membagi ruang, untuk itu Tata Ruang harus disepakati seluruh pihak dan ditetapkan oleh regulator yang sah karena itu menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.</p> <p>dalam perspektif ekoregion, tentunya kami menekankan adanya keterkaitan kewilayahan ekoregion dalam penataan ruang sehingga tercapai kelestarian ekosistem.</p> <p>ada beberapa isu penting yang perlu dimuat dalam Perda Tata Ruang, diantaranya</p>	
11/10/2022 11:44:00	Puji Prihatinningsih	Balai Taman Nasional Karimunjawa	Terima kasih sudah mengakomodir Taman Nasional Karimunjawa dalam ranperda RTRW Jateng. Semoga tata ruang kabupaten nantinya juga mendukung pengelolaan TN Karimunjawa terutama kawasan darat (hutan tropis dan hutan mangrove)	
11/10/2022 11:54:33	M NEVI TRI A	BAPERLITBANG KARANGANYAR	<p>1. kawasan situs sangiran di kec gondangrejo ada 8 desa yang terdampak yang masuk zona inti,zona penyangga,zona pengembangan dan zona penunjang. usulan kita mohon yang dimasukkan kawasan situs sangiran cuma zona inti saja mengingat dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat desa karena tanahnya tidak biasa untuk berusaha dan sampai sekarang kompensasi pemerintah belum optimal.</p> <p>2.sinkronisasi RTRW provinsi dan kabupaten</p> <p>3.jalan tembus kecamatan tawangmangu sekarang merupakan kawasan wisata kuliner yang sangat berkembang sehingga kalau hari libur macet parah. sebagian besar zonanya lindung dan hijau, sehingga kalau bisa area disepanjang jalan tembus tawangmangu dirubah zona kuning.</p> <p>4. penataan kawasan wisata kecamatan tawangmangu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - diperlukan kantong parkir - pelebaran jalan dari terminal tawangmangu sampai pertigaan sekipan - jalur alternatif untuk lalu lintas (pulang dan pergi tidak satu jalur) 	
11/10/2022 11:58:46	doddy ch	bappeda kota surakarta	kami berharap revisi ini tetap mempertimbangkan atau mengakomodir rtrw masing ² kab/kota, dng memprioritaskan penyelesaian permasalahan lintas kab/kota yg menuntut campur tangan provinsi	
11/10/2022 12:22:56	Hotmauli Sidabalok	Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata	<p>1. Perlu komitmen Pemprov Jateng dalam RTRW utk tetap menjamin kawasan pertanian, pesisir untuk menjamin ketahanan pangan.</p> <p>2. Konsultasi publik perlu melibatkan relevan aktor (masyarakat) untuk menjamin hak warga atas ruang Jawa Tengah. Untuk peserta hari ini saja sangat terbatas</p>	

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan maupun Saran	Masukan dan Saran
11/10/2022 12:29:45	Tri Setyo Wibowo, ST,	BAPPEDA Kota Tegal	Saran penyempurnaan Raperda yang saya buat berupa file karena ada koreksi sekitar 40 halaman sehingga butuh link kirim file	
11/10/2022 12:40:23	Wijanto Hadipuro	Unika Soegijapranata	Singkatnya saran saya: bagaimana mengintegrasikan RTRW dengan Tata Kelola air melalui Water Test untuk semua project	
11/10/2022 13:13:05	Deny Setiawan	Kemenko Perekonomian	Perlu dipastikan untuk kebijakan nasional yang turut serta mengatur pengembangan tata ruang di Provinsi Jawa Tengah sudah terakomodir.	https://drive.google.com/open?id=19hQYPIfOsZ57iGJx3wYdWp7GE530kEPI
11/10/2022 13:28:51	Setyo Adi	Kawasan industri Jatengland	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dibedakan antara istilah Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan kawasan industri (KI) 2. penentuan lokasi peruntukan industri hrs ada daya dukung tanah urug dan air baku bagi industri 3. Air baku untuk Semarang timur dan Demak barat (Sayung, Wonokerto) disediakan waduk di kolam retensi tol Semarang -demak. 4. Diberi peluang pengurangan dr pasir laut, krn tanah urug dr darat tidak mencukupi dan rawan timbulnya longsor. 5. Jalur logistik antar kawasan industri dan KPI dg pelabuhan Tanjung emas ditingkatkan kecepatannya. 6. Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kajian yg lebih dalam apabila menentukan lahan sbg KPI maupun KI shg investor ada guidance atas jenis industri yg cocok. 7. Menyediakan data yg valid/update terhadapku daya dukung dan daya tampung lahan/daerah yg diperuntukkan bagi industri. <p>Terimakasih</p>	